



SURAT TERBUKA UNTUK PANSUS RUU APP

Rido Triawan - Ketua Arus Pelangi

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 September 2006, Wakil Ketua Pansus RUU APP dari Fraksi PKS, *Yoyoh Yusroh*, di Gedung DPR-RI, Jakarta, mengatakan, "*Seluruh Pimpinan Fraksi di DPR dan Pimpinan Pansus sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU ini, karena ini amanat Rapat Paripurna DPR*".

Hal tersebut diperkuat dengan *statement* Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, *Agung Laksono*, di hadapan pimpinan dan anggota masyarakat ketika mengunjungi pondok pesantren Al-Mahmud, Sumedang, dan pondok pesantren An-Nawawiyah di Majalengka. Dia mengatakan, "*Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meneruskan pembahasan Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Susbtansinya dipastikan tidak diskriminatif terhadap golongan tertentu*" (*Media Indonesia-07/10/06*).

Dengan dikeluarkannya *statement* tersebut, kita diingatkan kembali akan pertentangan yang sangat hebat antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra terhadap RUU APP. Bahkan ada beberapa hal *ekstrim* yang dilakukan terkait dengan RUU APP, seperti *statement* masyarakat Bali yang akan memisahkan diri dari NKRI apabila RUU APP disahkan. Kemudian masyarakat yang pro terhadap RUU APP berbondong-bondong melakukan *sweeping* terhadap majalah, tabloid yang dianggap sebagai media pornografi. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap penjual, kios-kios yang menjual, serta kantor media pornografi.

Statement Wakil Ketua Pansus RUU APP dan Ketua DPR-RI itu membuat saya bertanya-tanya. Ketika pembahasan RUU APP menimbulkan konflik horizontal, anarkisme, dan ancaman disintegrasi bangsa, mengapa Pansus RUU APP tetap *kekeuh* untuk meloloskan RUU seperti ini menjadi UU ?.

Ketika pertanyaan saya tersebut belum terjawab, muncul beberapa berita yang cukup menghebohkan masyarakat. Pada tanggal 3 Desember 2006, beberapa surat kabar nasional menampilkan berita penemuan video skandal seks antara anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar, Sekretaris Fraksi Golkar, sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kerohanian, *Yahya Zaini*, dengan penyanyi dangdut *Maria Eva*.

Beberapa hari kemudian Anggota Fraksi PDI-P DPR-RI, *Permadi*, mengungkapkan bahwa sebagian anggota DPR mulai gemetar karena khawatir kasus serupa terungkap. "*Kalau Badan Kehormatan (BK) DPR mau menuntaskan kasus video porno jangan tanggung-tanggung, bersihkan sekalian semua,*" kata Permadi. Menurut Permadi *Yahya Zaini* hanya ketiban sial karena video pornonya beredar. "*Kalau mau jujur, banyak yang belum terungkap. Kamar-kamar anggota DPR dan kamar-kamar hotel bisa jadi saksi bisu perselingkuhan. Nggak usah ditutup-tutupi, di gedung DPR ini malah ada*

pemasoknya. Kalau mau dibersihkan, jangan tanggung-tanggung, sekalian saja borok-borok itu disikat habis", kata Permadi (Warta Kota-5/12/06).

Tidak cukup dengan kedua pemberitaan tentang momok yang dilakukan para anggota DPR-RI, masyarakat dikejutkan kembali dengan pemberitaan penemuan kondom bekas terpakai di saluran pembuangan air dari Gedung Nusantara I, II, III, dan IV Gedung DPR-RI.

Pusat pengaturan saluran pembuangan air itu sendiri terletak persis di depan kafetaria di dekat lobi gedung Nusantara I. Sekilas, bangunan penutup saluran pembuangan ini mirip dengan bangunan gardu listrik. Setiap paginya saluran ini dibersihkan. "Hampir setiap hari ada saja kondom yang ditemukan," ujar pengawas saluran. Petugas ini memastikan kondom itu berasal dari dalam gedung DPR karena saluran dari pipa ini tidak tercampur dengan saluran dari luar gedung (*Warta Kota-7/12/06*).

Dari beberapa fakta yang terungkap seputar perilaku anggota DPR-RI di atas, saya berharap bahwa anggota Pansus RUU APP DPR-RI, dapat berkaca kepada diri sendiri sebelum memaksakan suatu peraturan yang akan membelenggu hak-hak *private* masyarakat. Janganlah bangsa ini dibawa ke dalam lembah kemunafikan.

Namun pada kenyataannya banyak Undang-Undang yang dibuat DPR-RI hanya menghabiskan anggaran negara saja tetapi tidak efektif ketika diterapkan di dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena Undang-Undang yang dibuat seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945, serta melanggar keberagaman budaya bangsa Indonesia.

Selain itu DPR-RI sebagai sebuah lembaga politik sering memaksakan pemberlakuan suatu Undang-Undang hanya untuk memenuhi kepentingan politiknya saja, yaitu meraih dukungan dan suara dari kelompok masyarakat mayoritas semata. Padahal dengan jelas Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa Negara harus lebih memenuhkan dan melindungi hak-hak kelompok masyarakat yang rentan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya menekankan bahwa RUU APP bukanlah suatu jawaban untuk memperbaiki moral bangsa. Justru pola pendidikan yang baiklah yang dapat dijadikan kunci bagi kita semua untuk memperbaiki moral masyarakat.

Dalam kesempatan ini, saya meminta anggota Pansus RUU APP untuk menghentikan pembahasan RUU APP dan mengajak segenap bangsa Indonesia untuk: (1) bersama-sama memikirkan dan merumuskan pola pendidikan yang baik, serta (2) membangun tingkat kesadaran masyarakat secara positif yang akhirnya dapat memperbaiki moral bangsa ini.

Jakarta, 20-12-2006